

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan baik di Papua maupun Papua Barat. Secara akademik, temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi fiskal besar melalui Dana Otsus belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penyaluran, rendahnya kualitas perencanaan program, dan kurangnya pengawasan, sehingga dana tersebut tidak optimal dalam membiayai program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
2. Pertumbuhan ekonomi juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kedua provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya fenomena jobless growth atau pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana peningkatan PDRB lebih banyak ditopang oleh sektor ekstraktif berskala besar, seperti pertambangan, yang memiliki keterkaitan terbatas dengan sektor ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja setempat. Dengan demikian, meskipun angka pertumbuhan ekonomi meningkat, manfaatnya tidak secara merata dirasakan oleh rumah tangga miskin, terutama di daerah terpencil.

3. Variabel pendidikan terdapat perbedaan penting antara kedua provinsi. Di Papua, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tahun pendidikan belum diikuti oleh peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya, di Papua Barat, RLS berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran nyata dalam mengurangi kemiskinan, karena sistem pendidikan yang relatif lebih baik, keterhubungan wilayah yang lebih memadai, dan peluang kerja formal yang lebih besar.
4. Sementara itu, variabel kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif signifikan di kedua provinsi. Temuan ini sejalan dengan teori health-income nexus (Bloom & Canning, 2000) yang menyatakan bahwa kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas, memperpanjang masa kerja, dan mengurangi beban ekonomi akibat biaya pengobatan. Namun, Papua Barat cenderung merasakan manfaat yang lebih cepat dari peningkatan AHH karena dukungan infrastruktur kesehatan dan konektivitas yang lebih baik, sedangkan di Papua, dampaknya berjalan lebih lambat karena hambatan geografis dan keterbatasan layanan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Papua dan Papua Barat tidak cukup hanya mengandalkan besarnya dana fiskal atau pertumbuhan ekonomi makro. Keberhasilan membutuhkan sinergi antara kualitas belanja publik, pertumbuhan yang inklusif, pendidikan yang relevan dengan pasar kerja, serta layanan kesehatan

yang merata dan efektif. Dengan demikian, strategi pengurangan kemiskinan di kedua provinsi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait hubungan antara transfer fiskal, pertumbuhan ekonomi, modal manusia, dan kemiskinan di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial-budaya yang unik seperti Papua dan Papua Barat.

- a. Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan memperkuat *teori public expenditure inefficiency* (Musgrave & Musgrave, 1989), yang menyatakan bahwa alokasi dana publik tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak diarahkan secara efektif pada program yang bersifat *pro-poor* dan produktif.
- b. Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sejalan dengan konsep *jobless growth* (Kapsos, 2005), yang menegaskan bahwa pertumbuhan PDRB tidak akan berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan jika sektor yang tumbuh tidak menyerap tenaga kerja miskin atau tidak menghasilkan spillover yang inklusif.
- c. Perbedaan pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Papua (tidak signifikan) dan Papua Barat (negatif signifikan) mendukung *quality-adjusted education theory* (Hanushek & Woessmann, 2012), yang

menekankan bahwa lama pendidikan formal bukan satu-satunya faktor; kualitas pendidikan dan relevansinya terhadap kebutuhan pasar kerja merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan.

- d. Signifikansi negatif Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap kemiskinan di kedua provinsi memperkuat *health-income nexus theory* (Bloom & Canning, 2000), yang menjelaskan bahwa kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas kerja, pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan reorientasi penggunaan Dana Otsus dari fokus pada pembangunan fisik semata ke program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pelatihan keterampilan kerja, pembangunan karakter sumber daya manusia, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah daerah harus memprioritaskan investasi di sektor-sektor padat karya seperti pertanian bernilai tambah, perikanan, dan industri kecil, yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat miskin.

- c. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menjadi krusial, terutama di Papua, melalui peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan dengan pasar kerja, dan perluasan akses pendidikan menengah serta kejuruan. Papua Barat dapat melanjutkan strategi yang telah memberikan dampak positif sambil memperluas cakupan ke wilayah terpencil. Pendidikan juga harus memperkuat etos kerja, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, kemampuan manajemen diri, komunikasi, kerja sama dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Pembangunan karakter ini berfungsi memastikan bahwa pendidikan bukan hanya meningkatkan lama sekolah, tetapi juga kualitas SDM untuk keluar dari kemiskinan.
- d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas, namun pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat layanan kesehatan dasar melalui pembangunan dan revitalisasi puskesmas/pustu, penyediaan tenaga medis melalui skema penugasan khusus, serta penyediaan layanan kesehatan bergerak (*mobile clinic*) untuk menjangkau wilayah pedalaman. Untuk daerah yang sangat sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pengadaan ambulan udara (*air ambulance*) atau skema layanan evakuasi medis berbasis helikopter/*air-transport* yang memungkinkan rujukan cepat bagi pasien dalam kondisi gawat darurat. Pendekatan berbasis layanan langsung dan mobilitas tinggi ini dinilai lebih

relevan dibandingkan solusi digital, mengingat keterbatasan jaringan komunikasi di banyak wilayah.

- e. Dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi lintas sektor, menggabungkan intervensi fiskal, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga perbaikan di satu sektor tidak terhambat oleh kelemahan di sektor lainnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, keterbatasan ini dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum memisahkan pemekaran provinsi tahun 2022 yaitu munculnya provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan) menyebabkan perubahan administratif, namun penelitian ini masih menggunakan agregasi dua provinsi awal sehingga belum dapat melihat dampak pemekaran terhadap dinamika kemiskinan.

Selain itu, variabel-variabel makro seperti Dana Otonomi Khusus, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. Hal ini dapat disebabkan oleh belum terakomodasinya variabel-variabel lain yang bersifat lebih mikro, seperti efektivitas belanja program, kualitas tata kelola, pengelolaan anggaran desa, akses lapangan kerja, atau distribusi pendapatan yang mungkin lebih mampu menjelaskan dinamika kemiskinan di Papua dan Papua Barat.